

MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN MELALUI MASJID: KAJIAN AKSI PARTISIPATIF DALAM MERESPON MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA

Ida Rosyidah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ida_athens@yahoo.com

dan

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah

Pusat Studi Kajian Gender Universitas Indonesia
iklilahmdf@yahoo.com

Artikel diterima 30 Oktober, diseleksi 12 November, dan disetujui 8 Desember 2017

Abstract

This paper describes the experience of women's empowerment in optimizing mosque-based environmental benefits. The empowerment is conducted by academic community of Universitas Indonesia in collaboration with a women community in the island of Kelapa Dua of Kepulauan Seribu, Jakarta in 2016. By employing Participatory Action Research (PAR), the data was collected through all observing interactions, including interviews and Focus Group Discussions (FGD). In this study, Aileen Mitchell Stewart's theory of empowerment and Everett Hagen's concept of innovative personality are utilized to analyze the case. As the initial step of this participative action research, women's empowerment activities through a community mosque in Pulau Kelapa Dua are recognized as successful. There are, however, many remaining challenges and obstacles, although the result in changes and public awareness have reflected to empowerment components argued by Stewart. Even though there has yet to develop a massive movement throughout the women communities, a number of women has done efforts to sustain the existing empowerment participation through their innovative personalities. Therefore, they must continue to provide mentoring and supporting in order to maintain the community's cycle of participation in terms of both action and reflection, as well as fostering innovative personalities among the other members in order to further sustain the empowerment.

Keywords: Empowerment, Women's Island, Environment, Participative Action, Mosque.

Abstrak

Tulisan ini memaparkan tentang pengalaman pemberdayaan perempuan dalam memaksimalkan manfaat lingkungan hidup berbasis masjid. Pemberdayaan ini dilakukan oleh civitas akademika Universitas Indonesia bersama komunitas perempuan di Pulau Kelapa Dua Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada tahun 2016. Dengan Partisipatory Action Research (PAR), data diperoleh melalui proses interaksi yang ada, sekaligus wawancara dan focus group discussion (FGD). Dalam kajian ini, teori pemberdayaan Aileen Mitchell Stewart dan kepribadian inovatif Everett Hagen digunakan untuk membantu menganalisis perubahan yang terjadi. Sebagai bagian dari tahap awal penelitian aksi partisipatif, pemberdayaan perempuan melalui masjid di masyarakat pulau Kelapa Dua ini dapat dikatakan berhasil. Sejumlah hambatan dan tantangan masih terlihat, namun perubahan yang terjadi dan kesadaran masyarakat telah merefleksikan komponen pemberdayaan yang dijelaskan oleh Stewart. Meskipun belum terjadi gerakan massif pada seluruh komunitas perempuan, akan tetapi sejumlah perempuan telah berusaha menjaga keberlangsungan pemberdayaan yang ada melalui kepribadian inovatif yang mereka miliki. Karena itu, proses mentoring dan supporting harus terus dilakukan agar siklus partisipasi komunitas dalam aksi dan refleksi dapat terus terjadi, sekaligus menumbuhkan kepribadian inovatif pada anggota yang lain sehingga pemberdayaan bisa lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Perempuan Pulau, Lingkungan, Aksi Partisipatif, Masjid.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, masjid telah mengalami perluasan fungsi yang sangat substansial. Masjid tidak lagi hanya digunakan sebagai tempat sakral untuk beribadah, namun kini masjid juga berfungsi untuk berbagai kepentingan masyarakat, baik dalam konteks pendidikan keagamaan, maupun dalam konteks penguatan ekonomi, politik, kesehatan, dan lingkungan hidup. Fungsi masjid yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ritual ibadah ini sejatinya telah dicontohkan oleh Rasulullah lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Rasulullah sebagai kepala negara dan pemimpin agama menjadikan masjid sebagai pusat keagamaan dan pusat pemerintahan. Masjid Nabawi di Madinah digunakan umat Islam untuk beragam aktivitas. Selain untuk beribadah, Masjid Nabawi juga menjadi pusat pendidikan, pertukaran informasi, pengkajian, penyelesaian konflik, dan pusat peradaban Islam (Nurjamilah, 2016; Dalmeri, 2014). Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa Rasulullah sejatinya telah mengajarkan kepada umatnya tentang fungsi masjid sebagai sarana ibadah personal sekaligus sebagai media ibadah sosial.

Tidak terbatasnya fungsi masjid semata sebagai tempat ibadah sebagaimana yang sudah diajarkan Rasulullah ini, sayangnya, tidak terjadi pada kebanyakan masjid yang ada di Indonesia. Masih banyak kita temui masjid-masjid yang fungsinya dibatasi hanya sebagai pusat ibadah personal, atau ditambah sejumlah kegiatan yang berorientasi pada akhirat saja. Asumsi bahwa masjid hanya untuk kepentingan non duniawi ini menyempitkan eksistensi masjid yang idealnya juga dapat menjadi sarana pemberdayaan umat. Hal ini juga terlihat pada masjid yang berlokasi di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Sebagian pengurus masjid

masih memegang teguh pendapat yang menempatkan masjid hanya sebagai tempat ibadah dan bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan bersama masyarakat. Pandangan ini menjadikan satu-satunya masjid yang ada tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Pembatasan fungsi masjid ini pada akhirnya menyebabkan masjid kehilangan ruhnya dalam meningkatkan penghidupan masyarakat sekitarnya, sebagaimana Supardi dan Amiruddin (2001: 23-138) dan Syahidin, (2003: 115) menegaskan bahwa bila dikelola secara profesional, masjid sejatinya menjadi sumber kekuatan masyarakat dan dapat menjadi basis dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitarnya.

Menfungsikan masjid sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat sekitarnya telah terbukti memberikan hasil yang signifikan. Misalnya saja kajian Sujadi (2003) yang melihat peran takmir Masjid Al-Maun di lembah sungai Gajah Wong, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Soejati mengelaborasi peran besar masjid dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk meningkatkan kemampuan jamaah menjadi MC berbahasa Jawa, perbengkelan sepeda motor bagi jamaah laki-laki, serta menenun dan tata boga bagi kelompok perempuan. Demikian halnya kontribusi pengelola Masjid Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta pada masyarakat sekitarnya. Kajian Sugito (2013) menegaskan bahwa masjid juga dapat menguatkan ekonomi masyarakat dan jamaahnya melalui peningkatan kewirausahaan, bantuan modal, pendampingan usaha, dan bantuan jaringan pemasaran. Namun upaya pemberdayaan ekonomi ini harus dikuatkan dengan memberdayakan masyarakat dalam hal manajemen pengelolaannya. Hal ini penting agar kegagalan yang dialami Masjid At-Taqwa Bangkalan, Madura tidak terjadi. Kajian Auliyah (2014) menunjukkan bahwa pinjaman modal yang digulirkan masjid

mengalami hambatan besar karena manajemen yang kurang profesional.

Dalam konteks perempuan dan pemberdayaan di wilayah pesisir, sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir. Misalnya, Widodo, Bustamam, dan Soengkono (2011) yang menyarankan agar model pemberdayaan ekonomi pada perempuan keluarga nelayan miskin dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna terpadu.

Sementara itu, dalam konteks pemberdayaan pada masyarakat pesisir, kajian Hariyanto (2014) menunjukkan bahwa salah satu problem terberat masyarakat pesisir adalah jeratan hutang nelayan dengan juragan. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada masyarakat sebagai subyek utama. Akan tetapi, keterlibatan *stake holders* juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberdayaan yang dilakukan di wilayah Pantai Prigi Trenggalek tersebut.

Kajian Hariyanto ini dilengkapi oleh Nugroho (2015) melalui kajiannya pada nelayan di Kabupaten Pasuruan. Kajian Nugraha menunjukkan bahwa pemberdayaan pada masyarakat pesisir membutuhkan metode dan pendampingan yang dikembangkan oleh pendamping atau tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada nelayan. Potensi usaha dan modal yang dimiliki masyarakat pesisir belum signifikan memberikan perubahan pendapatan masyarakat sehingga intervensi program dapat lebih mendorong upaya pemberdayaan yang diharapkan.

Studi Rosyidah, Hanafie, Huda dan Nugraha (2016) terhadap pemberdayaan perempuan pesisir di desa Muara Binuangen, Wannasalam, Banten menemukan bahwa pemberdayaan

perempuan memerlukan adanya sarana pemasaran dan jaringan dengan beragam korporate dan koperasi sehingga produk olahan ikan yang sudah diproduksi bisa tersalurkan.

Dari sebagian hasil penelitian tersebut terlihat pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan pesisir difokuskan pada penguatan ekonomi. Sementara peran masjid dalam pemberdayaan lingkungan hidup melalui perempuan pesisir belum banyak dilakukan. Oleh karena itulah, tulisan ini akan mengelaborasi proses pemberdayaan lingkungan hidup berbasis masjid pada perempuan pesisir dengan menggunakan teori pemberdayaan Stewart dan kepribadian innovative Hagen sebagai kerangka teoritisnya.

Dalam kerangka teori Stewart, pemberdayaan masyarakat idealnya memperhatikan enam komponen kunci pemberdayaan, yaitu *enabling* (membuat mampu); *facilitating* (memperlancar); *consulting* (berkonsultasi); *collaborating* (bekerjasama); *mentoring* (membimbing); *supporting* (mendukung) (Stewart, 1994: 47). Komponen kunci ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi pemberdayaan yang dilakukan. Akan tetapi, dalam melihat hasil dari proses pemberdayaan yang dilakukan, teori ini terasa belum cukup. Diperlukan teori inovasi kepribadian yang dikembangkan oleh Hagen untuk memahami mengapa proses pemberdayaan tidak selalu berjalan massif. Kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan tidak cukup hanya dilihat dari faktor struktural semata. Dengan kata lain, struktur bukan elemen utama dalam perubahan sosial sehingga mengabaikan pentingnya kepribadian aktor dalam mempengaruhi perubahan. Secara tegas, Hagen menyatakan bahwa antara keduanya saling mempengaruhi, "*personality affects society and society affects personality*" (Hagen, 1962: 263).

Dari uraian di atas, maka tulisan ini akan memaparkan dua hal utama, yaitu bagaimana pemberdayaan lingkungan hidup berbasis masjid dilakukan oleh civitas akademika Universitas Indonesia terhadap perempuan di Pulau Kelapa Dua, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan sebagai aktor-aktor perubahan sosial dalam pelestarian lingkungan hidup. Dengan dua hal tersebut, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru yang melengkapi pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir, dengan memaksimalkan fungsi masjid dalam kerangka pemanfaatan lingkungan hidup; sekaligus menjadi inspirasi dalam memaksimalkan peran masjid di masyarakat sehingga masjid dapat menjadi basis segala aktivitas masyarakat sekitarnya, baik dalam konteks ibadah, maupun dalam upaya penguatan ekonomi, politik dan pemeliharaan alam dan lingkungan hidup. Untuk memahami konteks kajian ini secara lebih baik, kami terlebih dahulu akan menyajikan metode penelitian yang kami lakukan dan gambaran wilayah Pulau Kelapa Dua Kepulauan Seribu.

METODE

Participatory Action Research (PAR) Sebagai Metode Kunci

Pemberdayaan perempuan berbasis masjid ini berlokasi di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*), penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat menyadari problem yang ada, sekaligus melakukan tindakan dalam mengatasinya. Pilihan lokasi di pulau Kelapa Dua ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata tamat dan tidak tamat SD, tingkat pendapatan

masyarakatnya rata-rata di bawah UMR DKI Jakarta, dan hampir seluruh masyarakatnya berasal dari etnis Bugis, yang pada umumnya memiliki tradisi yang sama (Rosyidah dan Rokhmatin, 2014).

Dalam proses pemberdayaan melalui penelitian aksi partisipatif ini, selain melibatkan masyarakat perempuan penduduk Pulau Kelapa Dua, secara khusus juga intens melibatkan para *stake holders* kunci, yang terdiri dari aktivis kelompok perempuan, aktivis PKK, aktivis Karang Taruna dan pengurus majlis taklim kaum ibu dan istri pejabat di tingkat RT dan RW, serta pengurus masjid. Pelibatan para aktivis perempuan dan pengurus tersebut dilakukan karena dalam penelitian berbasis PAR dibutuhkan *stakeholders* yang memiliki kapasitas untuk menjadi agen-agen yang mampu melakukan perubahan di lingkungan masyarakatnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, selain memanfaatkan data yang diperoleh selama berinteraksi dengan masyarakat, juga dilakukan wawancara dan *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan pada tiga kelompok, yaitu kelompok perempuan aktivis, kelompok perempuan pada umumnya, dan pada kelompok laki-laki remaja dan dewasa di Pulau Kelapa Dua.

Sebagai sebuah kajian berbasis PAR, maka proses interaksi antara peneliti dan masyarakat, termasuk *stakeholders* dilakukan dalam bentuk kerjasama mendisain dan menghasilkan seluruh proses riset yang dilakukan. Peneliti lebih bersifat fasilitator dan pendamping, bersama para aktivis yang secara terus menerus menguatkan masyarakat kelompok perempuan. Kolaborasi antara peneliti dan *stakeholders* (orang-orang yang secara potensial dapat diberdayakan untuk riset ini) seperti mengembangkan spesifikasi pertanyaan, disain, pengumpulan data,

analisis, penerapan serta sosialisasinya merupakan bagian terpenting dalam PAR (Whitney-Thomas, 1997). Dengan begitu, kedudukan masyarakat Pulau Kelapa Dua adalah subyek yang setara dengan peneliti, bukan sebagai objek penelitian. Prinsip metode PAR ini dilakukan agar proses penyadaran dan pilihan solusi yang dilakukan masyarakat adalah yang terbaik dalam perspektif masyarakat. Untuk mencapainya, tidak ada cara lain, kecuali tim peneliti melebur dengan masyarakat, hidup bersama masyarakat, belajar pada masyarakat, serta menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri dalam proses penelitian dan pemberdayaan ini.

Metode PAR dipilih dengan maksud agar proses pemberdayaan dapat berlangsung sesuai harapan yang ada. Dengan metode PAR, kesenjangan yang ada antara peneliti dan masyarakat dapat diminimalisir, sehingga proses pemberdayaan dapat dilakukan bersama-sama masyarakat yang ada. Dari sisi metodologi penelitian, PAR tetap dapat dikategorisasikan sebagai penelitian ilmiah karena PAR merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan riset dan bukan untuk menghancurkan metodologi riset (Turnbull, Ann, Friesen dan Ramirez, 1998: 178). Dengan tiga pilar utama PAR, yaitu dimensi refleksi, partisipasi dan aksi yang dilakukan bersama-sama, maka proses transformasi atau perubahan sosial ke arah yang lebih baik akan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Di dalam proses yang dilakukan di Pulau Kelapa Dua, peneliti mengajak masyarakat perempuan mengamati secara langsung, bagaimana kondisi lingkungan mereka, mengamati tumpukan sampah, melihat potensi yang bisa dilakukan, serta mengidentifikasi problem-problem yang mereka hadapi dalam hal lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat, khususnya perempuan ini menghasilkan sejumlah kesadaran bersama yang dikembangkan

menjadi sebuah rencana melakukan suatu tindakan bersama (aksi). Pilihan solusi dilakukan bersama-sama, dengan memperhatikan empat tiga aspek utama, yaitu prioritas tindakan, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta peluang keberhasilan. Di dalam keseluruhan proses, ruang partisipasi dibuka secara maksimal agar mendorong masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya, menerapkan inovasi yang dipikirkannya, dan melatih dalam berpendapat secara bebas dan menentukan pilihan solusi bagi masalah lingkungan.

PEMBAHASAN

Sampah 'Kiriman' di Kelapa Dua dan Peran Perguruan Tinggi

Pulau Kelapa Dua merupakan salah satu dari sepuluh pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu. Masyarakat Pulau Kelapa Dua merupakan bagian dari DKI Jakarta, namun kehidupan mereka jauh tertinggal baik dari aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan dibandingkan dengan penduduk di wilayah DKI Jakarta lainnya. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 11,1 % di tahun 2013. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di DKI Jakarta yang hanya berkisar 3,10% -5,30 % (Widodo et al, 2015). Kemiskinan tersebut sejalan dengan IPM Pulau Seribu yang hanya mencapai angka 70, sementara kota lainnya mencapai 80. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kepulauan Seribu masih tergolong rendah yakni tamat SD, dan bahkan masih banyak ditemukan penduduk yang tidak lulus SD (Rosyidah dan Rokhmatin, 2014). Padahal, Kepulauan Seribu memiliki daya tarik tertentu dalam peta sosial Indonesia terutama potensi sumber daya laut dan pariwisata yang dapat dijadikan modal bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut data Dinas Perumahan dan Gedung Pemerinta Daerah (DPGD) DKI Jakarta tahun 2013, dari enam kota administrative DKI Jakarta, Kepulauan Seribu masih tercatat memiliki RW yang masuk kategori kumuh. Terdapat sebelas variabel yang menentukan sebuah wilayah termasuk dalam kategori kumuh, yaitu kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, keadaan jalan, keadaan drainase atau saluran air, tempat pembuangan air besar, pengangkutan sampah, cara membuang sampah dan penerangan jalan umum. Sejumlah variabel ini masih terlihat di Pulau Kelapa Dua, misalnya dari tumpukan sampah yang ada di sekitar rumah dan MCK umum, sedikitnya jumlah penduduk yang memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus), dan model rumah panggung yang tidak memiliki saluran pembuangan air. Kebiasaan ini menjadikan limbah rumah tangga dari kamar mandi dan dapur di lantai dua langsung dibuang ke tanah di lantai bawah rumah tanpa saluran pembuangan sehingga kerap menimbulkan bau tidak sedap dan lalat yang berkeliaran.

Tumpukan sampah dan budaya membuang sampah dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola ini menjadi bagian utama problem lingkungan hidup yang ada di Pulau Kelapa Dua. Tidak ada data yang pasti tentang jumlah sampah perminggu yang ada di pulau ini, namun tumpukan sampah yang mendominasi pinggiran pantai sebagian besar pulau ini merefleksikan situasi yang perlu diintervensi bersama. Menurut penjelasan warga, sampah yang menumpuk di banyak titik di pantai Pulau Kelapa Dua ini sebenarnya bukan hasil dari sampah masyarakat Pulau Kelapa Dua saja. Sebagian besar sampah yang ada di pinggiran pantai Pulau Kelapa Dua ini merupakan sampah kiriman dari Jakarta dan pulau lainnya yang terdampar terbawa arus air laut. Meskipun sebagian warga mengakui, bahwa sampah dari warga pulau turut berkontribusi

terhadap banyaknya sampah yang ada, namun hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan volume sampah yang terlihat.

Sampah yang ada dan menumpuk di sejumlah titik pantai yang idealnya jauh dari sampah ini telah mengganggu aktivitas warga sekitarnya. Apalagi titik tumpukan sampah ini justru berada di tempat-tempat penting seperti di samping dan belakang sekolah PAUD, di sekitar MCK dan jamban umum yang letaknya di antara rumah penduduk. Padahal bangunan PAUD ini merupakan satu-satunya bangunan pendidikan anak milik warga pulau ini, dimana aktivitas anak-anak terpusat di gedung sederhana dan mungil ini. Sementara untuk bersekolah, seluruh anak pulau Kelapa Dua ini harus menyeberang ke pulau lain, karena tidak tersedia di Pulau Kelapa Dua. Sampah yang berada di sekitar MCK dan jamban umum ini mengakibatkan aktivitas MCK warga terganggu.

Keberadaan sampah ini, pada mulanya tidak menjadi perhatian utama masyarakat pulau. Kesadaran mereka terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masih relatif rendah. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, membuang limbah air rumah tangga dan air mandi di tanah sekitar rumah, serta tidak memiliki tempat untuk mandi cuci kakus (MCK) masih dominan terjadi. Berdasarkan data laporan bulanan Kelurahan Pulau Kelapa per-Juli, 2014, dari 144 kepala keluarga yang ada di pulau ini, hanya ada 25 rumah yang memiliki MCK pribadi, selebihnya menggunakan MCK umum, yang lokasinya penuh dikelilingi tumpukan sampah. Hal ini merefleksikan belum adanya kesadaran masyarakat secara massif terhadap kebersihan lingkungan hidupnya dan dampak kongkritnya pada kesehatan lingkungan dan keluarga.

Kondisi lingkungan hidup yang tidak sehat ini pada akhirnya berdampak pada perempuan karena perempuan lah yang paling banyak bersentuhan dengan lingkungan hidup sekitarnya. Sampah yang menumpuk hasil pembuangan warga, sampah limbah rumah tangga, dan sampah kiriman dari luar pulau menjadi bagian yang terus menerus bersentuhan dengan perempuan. Selain karena perempuan secara budaya masih bertanggung jawab terhadap urusan domestik, juga karena perempuan di pulau ini mayoritas tidak ikut melaut mencari ikan untuk penghidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, dampak sampah bagi kesehatan lebih banyak dialami perempuan dan anak-anak yang dalam keseharian lebih banyak di rumah. Dengan demikian, perempuan dan anak-anaklah kelompok yang paling rentan terhadap dampak lingkungan yang tidak sehat ini, terutama saat hamil, menyusui, dan anak-anak yang masih usia balita.

Merespon realitas ini, maka civitas akademika perguruan tinggi tidak dapat tinggal diam. Keberadaan perguruan tinggi yang selama ini dianggap menara gading karena kurang peduli terhadap problem masyarakat telah berusaha dipatahkan dengan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 menjadi dasar yang kuat. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itulah, merespon situasi yang tergambar dalam Pulau Kelapa Dua ini, maka perguruan tinggi tidak dapat abai dan tutup mata. Perguruan tinggi memiliki kewajiban bukan hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga pada bagaimana pengetahuan yang diperoleh diimplementasikan dalam realitas nyata untuk mengatasi problem-problem sosial

yang dihadapi masyarakat, termasuk Pulau Kelapa Dua.

Tanggungjawab perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikenal dengan istilah *Academic Social Responsibility (ASR)*. Bentuk ASR dari perguruan tinggi dapat dilakukan dalam beragam kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), pendampingan desa binaan, pengabdian masyarakat, dan bakti sosial. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, kegiatan yang dikembangkan dapat menyentuh beragam hal yang bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan manusia sesuai bidang studi yang dipelajari di Perguruan Tinggi, seperti civitas akademika dari jurusan ekonomi bisa melakukan penguatan ekonomi pada masyarakat, pengusaha UMKM, dan koperasi. Civitas akademika jurusan tehnik dapat mengembangkan teknologi tepat guna bagi masyarakat, seperti pada pedagang keripik, olahan rumahan (*home industry*), dan olahan limbah. Demikian juga pada jurusan lain, seperti jurusan kesehatan masyarakat yang penting menguatkan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, dan jurusan hukum dalam menguatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kemanusiaan seperti *human trafficking*, dan kejahatan seksual. Upaya inilah yang juga dilakukan civitas akademika Universitas Indonesia. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya integratif dan berkelanjutan menjadi keniscayaan yang menjadi bagian dari tugas penting perguruan tinggi. Dengan berbagai pendekatan metode, termasuk penelitian aksi partisipatif (PAR), transfer pengetahuan dan keterampilan yang disertai dengan pendampingan dan evaluasi program yang terus menerus dilakukan kegiatan ini dapat berkelanjutan dan menghasilkan perubahan yang signifikan.

Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hidup

Sebagai satu-satunya masjid yang berada di Pulau Kelapa Dua, pada mulanya kegiatan di masjid *Al-Jannatun Naim* dan majlis taklim kaum perempuan masih lebih dominan berfokus pada aspek keagamaan semata. Namun dialog yang dibangun bersama membangun kesadaran masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat RT-RW tentang problem lingkungan hidup yang cukup serius, yaitu sampah, limbah rumah tangga, dan limbah keluarga. Upaya pemerintah daerah di tingkat RT dan RW baru sebatas melaksanakan program kerja bakti, namun itupun sudah cukup lama tidak aktif dilakukan.

Berbekal proses awal membangun dialog dan kesadaran masyarakat ini, para peneliti dan pengabdian dari Pusat Riset Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak Dewan Masjid Indonesia (PPMA DMI) Pusat, Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Samo-Samo Kepulauan Seribu melakukan penelitian aksi dengan menggunakan pendekatan PAR yang menekankan pada penelitian dan pemberdayaan.

Pada proses implementasinya pemberdayaan ini diarahkan pada penguatan sumber daya, terutama pada sumber daya manusia dan organisasinya. Suryana (2009: 17) mendefinisikan sumberdaya yaitu merupakan faktor produksi yang terkait di dalamnya berupa *natural resources, human resources, capital resources, entrepreneurial resources, information dan communication*. Penelitian aksi partisipatif (PAR) yang dilakukan saat itu memprioritaskan pada pemberdayaan manusianya (*human resources*), khususnya pada peningkatan kapasitas perempuan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait lingkungan hidup,

meningkatkan sikap kritis, dan inovatif sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan lingkungannya kearah yang lebih baik di masa depan.

Hasil diskusi melalui FGD dan refleksi bersama warga, teridentifikasi problem lingkungan pada empat kategori. *Pertama*, limbah kotoran manusia belum dibuat sesuai dengan standar kesehatan. Ada beberapa faktor penyebabnya yaitu budaya membuang kotoran manusia di laut yang masih mengakar di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak penduduk yang lebih memilih menggunakan jamban cemplung di laut. Selain itu, masyarakat belum terbiasa menggunakan MCK sehingga tiga buah MCK yang dibangun pemerintah dan satu buah MCK yang dibangun secara swadaya tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan kondisinya sudah mulai rusak. *Kedua*, belum tersedianya tempat pembuangan akhir limbah rumah tangga sehingga sampah organik dan non-organik masih berserakan di sekitar rumah penduduk. Selain itu, tidak adanya saluran drainase yang dapat digunakan masyarakat.

Ketiga, kesadaran akan perilaku hidup sehat masih rendah, seperti masih banyak laki-laki yang merokok di dalam rumah, ibu-ibu tidak membiasakan anak-anak cuci tangan, dan anak-anak masih membuang air besar disembarang tempat di laut. *Keempat*, penghijauan, masih sangat terbatas karena kurangnya air tawar. Selama ini, penghijauan sangat tergantung pada musim. Jika kemarau datang, lingkungan menjadi gersang karena pohon-pohon mati kekurangan air. Kesadaran akan penghijauan rendah karena masyarakat berpikir bahwa kebersihan rumah mereka merupakan tanggung jawab petugas kebersihan. Kurangnya air bersih juga menjadi kendala untuk penanaman pohon untuk penghijauan. Penduduk pada umumnya menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih dan air RO yang produksinya rendah.

Hasil identifikasi masalah ini menunjukkan problem lingkungan masih cukup banyak dan tak mungkin dipecahkan dalam waktu singkat. Masyarakat menyepakati dilakukannya aksi bersama berdasarkan skala prioritas yang ada. Salah satu aksi bersama yang dinilai penting dilakukan segera adalah penguatan ketrampilan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos dan kerajinan tangan. Maka disepakatilah waktu yang memungkinkan mayoritas warga perempuan turut serta dalam kegiatan ini. Dengan memanfaatkan lahan di teras masjid, penguatan ketrampilan pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan mengikuti model pengolahan kompos Takakura. Sementara pengolahan sampah non-organik menjadi kerajinan tangan dilakukan dengan mengajarkan aneka kreasi cantik dari sampah plastik yang dicover dengan bahan flanel menjadi boneka, bantal, bros, gantungan kunci, dan aneka kreasi lainnya.

Bila dilihat dalam kerangka Stewart, pelibatan perempuan-perempuan di Kelapa Dua mulai dari identifikasi masalah terkait lingkungan hidup, penentuan prioritas pemberdayaan serta pelaksanaan pemberdayaan membuat sampah menjadi kompos merupakan proses *enabling*, sementara beragam fasilitas yang disediakan oleh civitas akademika UI seperti FGD merupakan instrument *facilitating* untuk memperlancar proses pencapaian tujuan yakni kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup.

Dalam proses pemberdayaan ini, sejumlah saran pemberdayaan yang ditekankan Stewart dilakukan agar harapan capaian yang diperoleh sesuai harapan yang diinginkan warga. Untuk memperkuat kerjasama (*collaborating*) diantara warga, khususnya para aktor lingkungan hidup, warga perempuan

menyepakati membuat satu perkumpulan bernama "*Bola Mappapole Dale*". Kata ini berasal dari bahasa Bugis yang artinya 'Rumah yang Membawa Keberkahan'. Melalui perkumpulan ini, gerakan pemberdayaan diharapkan dapat lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Pada perjalanannya, perkumpulan "*Bola Mappale Dale*" dijadikan ajang tidak hanya untuk berdiskusi soal problem lingkungan hidup yang mereka alami tetapi juga tempat sharing pengalaman dan konsultasi antar anggota terkait kehidupan sehari-hari (*consulting*). Ini dimungkinkan karena anggota perkumpulan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda yaitu ustadzah, pengurus PKK tingkat kelurahan, isteri Ketua Rukun Tetangga (RT), istri Rukun Warga, pedagang dan ibu rumah tangga. Keragaman pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki memberi peluang adanya kesempatan untuk berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman.

Evaluasi dan mentoring sebagai unsur yang juga penting sebagaimana diungkapkan Stewart (1994) dilakukan tim civitas akademika UI selama beberapa bulan pendampingan. Namun, evaluasi dan mentoring terus dilakukan melalui media teknologi, terutama terkait hambatan yang dialami dalam proses pemberdayaan lingkungan yang mereka lakukan.

Pada saat monitoring dan evaluasi ditemukan bahwa hanya perempuan-perempuan kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan skill pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan sampah non-organik menjadi beragam barang kerajinan tangan. Motivasi untuk menghemat pengeluaran belanja sehari-hari juga menjadi dasar minat sebagian perempuan terus melanjutkan skill mengolah sampah organik menjadi pupuk.

Menumbuhkan Kepribadian Inovatif Sebagai Langkah Solusif

Proses pemberdayaan dengan pendekatan PAR di Pulau Kelapa Dua ini menghadapi sejumlah kendala. Secara struktural, kendala yang dihadapi masyarakat (perempuan) ketika berkeinginan melakukan berbagai aktifitas di wilayah masjid. Izin dari pengelola masjid yang harus diperoleh terlebih dahulu untuk dapat melangsungkan berbagai kegiatan partisipatif tidak mudah. Diperlukan campur tangan sejumlah stakeholders yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dengan pengelola masjid. Pendekatan kultural pun dilakukan agar izin kegiatan berbasis masjid diperoleh, mulai melakukan silaturahmi dengan tokoh agama setempat, dialog secara khusus dengan pihak pengelola masjid, serta membangun kesadaran tentang pentingnya fungsi masjid diperluas tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan semata. Kerjasama dalam upaya ini berhasil, meskipun kegiatan dibatasi pada waktu dan tempat di masjid yang ada, namun telah membuka akses dan peluang perempuan memiliki aktivitas lebih di masjid.

Selain kendala struktural, kendala kultural juga harus dihadapi masyarakat dalam penguatan pemberdayaan ini. Kendala kultural di awal, dimana sebagian warga dan pengelola masjid masih menempatkan masjid sebagai fungsi ibadah saja telah diuraikan sebelumnya. Alasan penolakannya, diantaranya adalah karena pandangan yang masih kuat menempatkan masjid sebagai tempat yang sakral, yang hanya digunakan khusus untuk ibadah. Selain itu, sebagian pengurus masjid merasa khawatir, bahwa kaum perempuan tidak dapat menjaga kesucian masjid. Karena itu, mereka dengan tegas menolak bila teras masjid dijadikan sebagai pusat aktivitas kelompok perempuan,

sebagaimana diungkapkan salah seorang pengurus masjid dalam wawancara informal, "*Saat pengajian, ibu-ibu bawa anak-anak ke masjid. Masjid jadi kotor. Anak-anak makan kue, dan permen. Lantai jadi lengket*".

Kendala kultural lainnya yang terasa nyata terlihat pada hasil yang dicapai pasca pelatihan pengolahan sampah organik dan non-organik. Sebagian besar warga perempuan mencoba melanjutkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Namun upaya mereka dihadapkan pada kendala kultural, dimana ikatan persaudaraan antar warga menjadikan sebagian warga enggan mengelola sampah rumah tangganya sendiri dan memilih mengambil hasil dari tetangga atau saudaranya yang berhasil. Misalnya saja, Yuli, istri Ketua RT yang bercerita bahwa ia sudah memanfaatkan pembuatan kompos Takakura dari limbah sampah rumah tangganya. Namun hasil yang diperolehnya, yang sedianya digunakan untuk pupuk tanaman cabe dan sayuran lainnya, tidak dapat maksimal karena kerap diminta oleh para tetangganya. Para tetangga ingin memiliki tanaman subur seperti milik Ibu Yuli namun enggan membuat sendiri. "*Pupuk saya banyak yang minta, karena cabe dan sayur saya subur. Mereka pengen kayak saya, tapi maunya minta saja*", tutur Ibu Yuli saat tim peneliti berkunjung untuk melihat keberlanjutan program ini.

Realitas ini merefleksikan adanya kendala kultural, sekaligus menunjukkan bagaimana kepribadian inovatif menjadi salah satu faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Keberadaan perkumpulan "*Bola Mappapole Dale*" tidak dapat menjadi satu-satunya faktor determinan yang menjamin keberlangsungan program. Masjid sebagai basis lokasi pemberdayaan juga tidak dapat berjalan jika kepemimpinan dalam lembaga "*Bola Mappapole Dale*" tidak dikuatkan dengan kepribadian

inovatif yang ada pada individu-individu aktor utama dari *stakeholders* yang ada. Karena itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran individual merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengalaman pemberdayaan yang sudah dilakukan di tahun pertama ini merefleksikan sejumlah keberhasilan sekaligus tantangan baru. *Pertama*, civitas akademika Universitas Indonesia melalui penelitian aksi partisipatif (PAR) telah berhasil mengajak masyarakat, khususnya kelompok perempuan dalam mengidentifikasi problem yang ada di lingkungan sekitar mereka. Identifikasi ini berlanjut pada kesadaran akan pentingnya aksi bersama dalam memanfaatkan problem lingkungan hidup menjadi salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. *Kedua*, civitas akademika UI bersama-sama *stakeholders* telah berhasil meyakinkan sejumlah warga dan pengurus masjid tentang pentingnya memaksimalkan fungsi masjid dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan kepedulian pada lingkungan hidup. *Ketiga*, adanya perubahan kesadaran bahwa masjid telah menjadi tempat yang tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata. Perempuan yang sebelumnya hanya terbatas dalam memanfaatkan fungsi masjid, telah beralih menjadi bagian penting dalam meramaikan aktivitas masjid. Dengan perubahan pandangan terhadap fungsi dan makna masjid ini, maka berbagai rencana aksi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan secara lebih maksimal, sehingga masjid tidak lagi eksklusif dan rentan tersusupi oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan masyarakat, seperti terorisme.

Tantangan mendasar yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis masjid ini adalah kuatnya pemahaman dan pandangan akan fungsi masjid. Pengetahuan tentang sejarah fungsi masjid di masa Rasulullah menjadi informasi penting dalam menghadapi tantangan ini, sekaligus metode dan pendekatan yang memperhatikan aspek kultural dan struktural merupakan strategi yang penting. Selain itu, tantangan utama yang saat ini terlihat adalah keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat yang idealnya terus berlangsung tidak dapat dilepaskan dari kekuatan para personal di dalamnya. Membangun kesadaran masyarakat secara bersama-sama dan menguatkan mereka dalam bentuk perkumpulan merupakan langkah penting dan strategis dalam pemberdayaan yang dilakukan. Akan tetapi, proses pemberdayaan ini harus memperhatikan aktor-aktor kunci di luar kelompok structural yang dapat menjadi aktor utama dalam memastikan keberlangsungan pemberdayaan yang ada. Dengan melibatkan individu-individu yang memiliki kepribadian inovatif, kekuatan pemberdayaan akan lebih kuat dan lebih memberikan harapan terhadap keberlangsungannya di masa mendatang.

Dari pengalaman belajar bersama dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Pulau Kelapa Dua Kepulauan Seribu ini, ada tiga rekomendasi penting yang menjadi refleksi dari kegiatan ini. *Pertama*, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga lokal yang bergerak di bidang pemberdayaan lingkungan hidup untuk melakukan pemberdayaan yang berkesinambungan dengan mendasarkan diri pada indikator keberhasilan yang jelas pada setiap tahapannya. *Kedua*, upaya penguatan dan pendampingan pada kelompok perempuan "Bola Mappapole Dale" yang sudah memiliki sejumlah perempuan dengan tenaga terampil perlu dilanjutkan

dan dimonitor agar semakin kuat dan berkelanjutan (*sustainable*). *Ketiga*, pelatihan terkait lingkungan hidup dan kesehatan dari perspektif Islam bagi para tokoh agama dan tokoh adat perlu dilakukan untuk mempercepat pemahaman masyarakat tentang pelestarian lingkungan karena mereka merupakan aktor-aktor utama yang strategis dalam sosialisasi lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini tidak akan pernah dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi di dalamnya, yaitu

1. Universitas Indonesia melalui Departemen Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) yang telah menyediakan program pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia.
2. Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Samo-Samo yaitu sebuah lembaga NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan berdomisili di pulau Pramuka. Lembaga ini secara aktif telah melakukan beragam program dan aktivitas seperti pengolahan sampah, penanaman mangrove dan lain-lain sejak tahun 2008. Kontribusi SPKP Samo-Samo dalam menguatkan perempuan melalui workshop dan berbagi pengalaman dalam mengembangkan organisasi berbasis lingkungan dan strategi dalam menghadapi hambatan telah menguatkan kesadaran perempuan dalam partisipasinya di lingkungan hidup.
3. Taman Nasional Kepulauan Seribu SPTN Wilayah Satu Pulau Kelapa, sebuah lembaga Negara yang berorientasi melakukan perlindungan terhadap satwa laut yang hampir punah. Taman Nasional ini telah menjadi mitra yang produktif dalam menguatkan kelompok perempuan, sekaligus meyakinkan kelompok laki-laki tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup.
4. Dewan Masjid Indonesia Pusat, khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan Muslimah dan Anak (PPMA). DMI merupakan lembaga non profit yang beranggotakan pengurus masjid di hampir seluruh Indonesia, sedangkan bidang PPMA bergerak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di berbagai sektor kehidupan dengan berbasis mesjid. Kontribusi PPMA DMI Pusat dalam kegiatan ini, selain karena lokasi pemberdayaan adalah masjid, juga karena kelompok yang diperkuat adalah kelompok perempuan. Selain itu, dalam proses kegiatan penelitian aksi partisipatif ini, DMI bersama tim peneliti mengadakan bakti sosial dengan masyarakat di lokasi penelitian.
5. Terakhir, terima kasih penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurjamilah, Cucu, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi Saw., *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 2016, h. 93-119
- Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural, *Walisono*, Vol. 22, No. 2, November 2014, p.321-350.
- Supardi & Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam Pembagunan Masyarakat: Optimalkan Peran Masjid, Cet. 1, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sujadi, Peran Takmir Masjid Al-Maun Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta, *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. IV, No. 2 Desember 2003, h.159-174.
- Sugito, Kontribusi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah (studi pada Masjid Jogokaryan Mantrijeron Yogyakarta, *Tesis Universitas Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2013.
- Auliyah, Robiatul, Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan, *Jurnal Beranda*, Vol 8, No 1, 2014.
- Widodo, Slamet, Bustamam, Hendri, dan Soengkono, Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu (Studi Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara), *Majalah Ekonomi*, Tahun XXI, No. 1 April 2011, 13-24.
- Hariyanto, Slamet, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 2.No.1 Tahun 2014, Tulungagung: Universitas Tulungagung, 2014.
- Nugroho, Matheus, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai, *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol.6 No.1, Januari 2015, 2015, h. 16-26.
- Rosyidah, Hanafie, Huda dan Nugraha, *Pengembangan Skill Pengolahan Ikan Bagi Perempuan Pesisir Di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Provinsi Banten*, Jakarta: PPM-LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Stewart, Aileen Mitchell, *Empowering People*, London: Pitman Publishing, 1994
- Hagen, Everett, *On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins*, Homewood: Dorsey Press, 1962.
- Rosyidah, Ida dan Rokhmation, Tien, *Laporan Penelitian Relasi gender dan Pengambilan Keputusan dalam Keluarga Nelayan pada Komunitas Nelayan di Kepulauan Seribu*, LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Laporan Bulanan Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kepulauan Seribu, Per-Juli, 2014.

- Whitney-Thomas, J., Participatory Action Research As An Approach To Enhancing Quality Of Life For Individuals With Disabilities. In R. L. Schalock (Ed.), *Quality of life: Vol. H. Application to persons with disabilities* (pp. 181-197). Washington, DC: American Association on Mental Retardation, 1997.
- Turnbull, Ann P., Barbara J. Friesen dan Carmen Ramirez, "Participatory Action Research as a Model for Conducting Family Research", *JASH* (sekarang dikenal dengan *RPSD, Research and Practice for Persons with Disabilities*), Vol. 23, No. 3, 1998, h. 178-188.
- Widodo, Nyoto, et all, *Jakarta dalam Angka (Jakarta in Figure)* 2015, BPS DKI Jakarta, 2015.
- Suryana, *Achievement Motivation and Empowerment (Seri Manajemen Sumberdaya Manusia): Diperuntukkan Terbatas Sebagai bahan Perkuliahan Bagi Magister Manajemen, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia*, 2009.